

RESPON MASYARAKAT TERHADAP POLA AGROFORESTRI PADA HUTAN RAKYAT PENGHASIL KAYU PULP

*The Community Responses Toward Agroforestry Pattern of Pulpable
Species On Private Forest*

Syofia Rahmayanti

Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan
Jl. Raya Bangkinang – Kuok Km. 9 Kotak Pos 4 / BKN Bangkinang 28401
Telp. 0762-7000121, Fax. 0762-7000122

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan upaya strategis dalam mengatasi permasalahan kelangkaan bahan baku industri pengolahan kayu domestik di Indonesia. Hal ini karena persediaan pasokan bahan baku dari hutan alam produksi semakin menurun. Salah satu bentuk HTI yang saat ini memegang peranan penting dalam menunjang pengembangan industri kayu serat domestik adalah HTI kayu serat atau HTI pulp. Pentingnya pembangunan HTI Pulp antara lain dapat dilihat dari kenyataan besarnya ketergantungan jenis industri ini kepada kayu serat.

Produktivitas HTI pulp sampai saat ini dilaporkan masih rendah, baik karena target luasan yang belum tercapai maupun produksi kayu dan riap volume tegakan yang masih di bawah asumsi (Hendromono *dkk.*, 2006). Proyeksi kebutuhan kayu pulp pada tahun 2013 adalah 58,87 juta m³, sedangkan pasokannya diperkirakan hanya 41,39 juta m³ (Departemen Kehutanan, 2006). Oleh karena itu peningkatan produktivitas HTI masih perlu dilakukan, baik melalui tindakan-tindakan silvikultur maupun dengan menambah luas tanaman. Salah satu alternatif untuk menambah luas tanaman adalah dengan memanfaatkan hutan rakyat.

Hutan Rakyat (HR) merupakan salah satu program Kementerian Kehutanan yang tujuannya selain untuk menyokong kebutuhan kayu industri / pertukangan, juga sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan manfaat ekologis dari lahan masyarakat karena ditanami komoditas kehutanan. Definisi HR menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004 adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Sasaran pengembangan HR diarahkan pada lahan milik rakyat, tanah adat atau lahan di luar kawasan hutan yang memiliki potensi untuk pengembangan HR, dapat berupa lahan tegalan dan lahan pekarangan yang luasnya memenuhi syarat sebagai HR.

Pemanfaatan hutan rakyat untuk penanaman kayu penghasil pulp harus diikuti dengan penyediaan sumber pendapatan jangka pendek masyarakat dari lahan yang dimanfaatkan untuk jangka panjang dengan penanaman jenis penghasil kayu pulp. Penanaman kayu jenis penghasil pulp di hutan tanaman masih menyisakan lahan terbuka di antara pohon-pohonnya. Lahan di bawah

tegakan ini belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama pada tahun-tahun pertama setelah penanaman dimana cahaya matahari masih dapat masuk dan belum terhalang oleh tajuk pohon. Agroforestri adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat ditawarkan untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan tanaman yang juga dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Alviya dan Suryandari (2006), agroforestri mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan ekologi. Dengan pola agroforestri diharapkan tujuan pemanfaatan hutan rakyat untuk penanaman kayu penghasil pulp dapat mengakomodir tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian hutan.

Pemanfaatan lahan hutan rakyat untuk penanaman kayu penghasil pulp dengan pola agroforestri merupakan hal baru. Beberapa pola agroforestri yang telah dilakukan masyarakat tidak menggunakan jenis kayu penghasil pulp untuk komoditi kehutanannya. Di Jawa Barat, pola agroforestri yang diterapkan dikenal sebagai kebun-talun, dengan komposisi pohonnya berupa penghasil kayu bakar, kayu untuk bangunan, serta pohon buah-buahan (Kartasubrata, 2003). Di Pesisir Krui, Lampung, repong damar merupakan asosiasi pohon penghasil damar dengan pohon buah-buahan, jenis-jenis palem, penghasil rempah, dan beberapa pohon penghasil kayu untuk bangunan. Sedangkan di Sanggau, Kalimantan Barat, kebun yang ditanami pohon-pohon penghasil buah dan hasil hutan bukan kayu dikenal sebagai tembawang (Prahasto, 2002).

Dalam pengelolaan hutan tanaman penghasil kayu pulp perlu diterapkan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau *Sustainable Forest Management* (SFM), yang mengandung arti bahwa dari unit pengelolaan hutan tanaman penghasil pulp selain diperoleh kayu untuk bahan baku pulp dengan volume (biomassa) dan kualitas yang maksimal serta relatif sama setiap tahun (fungsi produksi), dapat pula diperoleh fungsi ekologi dan fungsi sosial yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Fungsi sosial mencakup manfaat ekonomi dan budaya bagi masyarakat yang ditekankan kepada kemampuan hutan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan serta memelihara nilai-nilai budaya masyarakat (Mindawati, 2009).

Rochmayanto (2010) mengatakan bahwa lahan milik yang tersedia di Riau sebagian besar tidak dialokasikan sebagai hutan rakyat, tetapi dialokasikan sebagai areal kebun karet atau sawit. Adapun pemanfaatan lahan masyarakat oleh perusahaan HTI yang ada di Riau selama ini adalah melalui pola kemitraan dengan kerjasama bagi hasil dan dukungan pendanaan sepenuhnya dari perusahaan. Jenis yang dikembangkan adalah *Acacia mangium* dengan jarak tanam 3m x 3m, tanpa tanaman sela.

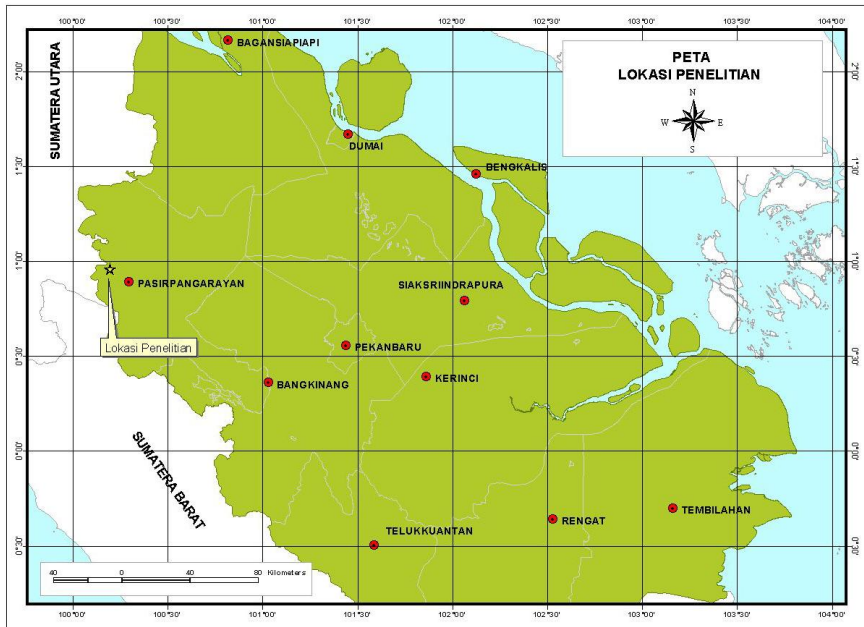
Berkaitan dengan rencana pembangunan plot percontohan pola agroforestri tanaman penghasil kayu pulp di hutan rakyat oleh Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat maka dilakukan studi pendahuluan terhadap minat masyarakat terkait rencana pembangunan plot tersebut. Kajian dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah minat dan pandangan masyarakat terhadap pola agroforestri pada hutan rakyat penghasil kayu pulp. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi kegiatan pembangunan plot yang akan dilakukan, mengingat bahwa sebagian besar lahan milik masyarakat selama ini dialokasikan untuk areal kebun karet atau sawit. Tulisan ini akan memaparkan hasil kajian tentang respon masyarakat terhadap pola agroforestri pada tanaman penghasil

kayu pulp yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilakukan di lahan hutan rakyat.

II. METODE KAJIAN

A. Lokasi Kajian

Kajian dilakukan di Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada bulan September 2010. Desa Pasir Intan memiliki wilayah dengan luas 22,99 Km² atau 2.460 ha. Perbatasan desa adalah : sebelah utara dengan HTI PT. SSL, sebelah selatan dengan Desa Pasir Agung, sebelah barat dengan Desa Bangun Purba, dan sebelah timur dengan Desa Rambah Jaya. Ketinggian tempat adalah 85 m dpl, curah hujan 247,41 mm/hari dengan suhu harian 32°C. Jenis tanah pada umumnya merah dan lempung. Terdapat kebun desa seluas 4 ha (tanah makam), sawah/ladang 896 ha, lahan pekarangan 132 ha dan lahan perladangan 861 ha.



Gambar 1. Peta lokasi kajian

B. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat dengan menggunakan kuisioner. Terdapat 48 kepala keluarga (KK) sebagai responden, yang dianggap representatif mewakili 474 KK (10% dari jumlah KK). Informasi penting yang digali adalah : potensi sumberdaya manusia dan tata nilai sosial budaya masyarakat, pandangan masyarakat secara umum, harapan, hambatan dan kebutuhan terhadap kegiatan agroforestri, dan menggali

minat masyarakat dalam kegiatan agroforestri yang akan dilakukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Pengumpulan data sekunder meliputi wilayah desa dan lingkungannya, karakter lahan dan sosial ekonomi masyarakat, yang diperoleh dari monografi desa.

III. HASIL KAJIAN

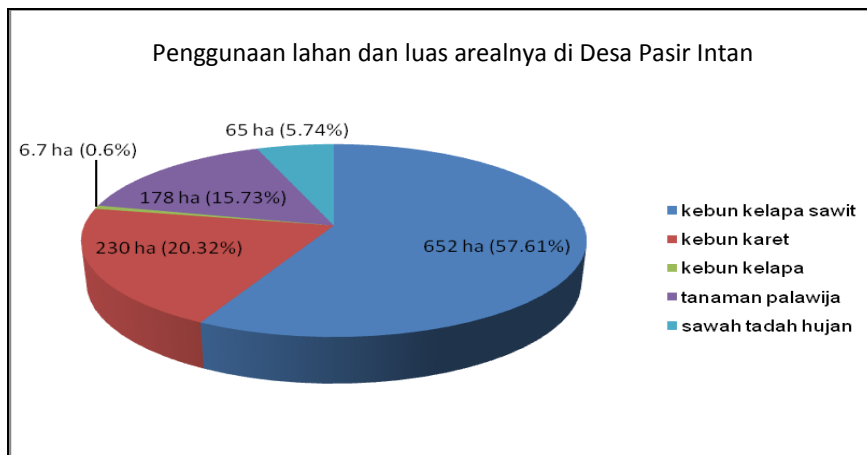
A. Pola Mata Pencabarian

Desa Pasir Intan mempunyai penduduk sebanyak 1.751 jiwa dengan kepadatan penduduk 76 orang/Km², yang terdiri dari 474 KK. Dari jumlah tersebut 51,23% di antaranya adalah laki-laki (897 orang) dan 48,77% (854 orang) adalah perempuan. Pada umumnya masyarakat mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah, sekitar 56,84% masyarakat mempunyai tingkat pendidikan SD, SLTP 29,98%, SLTA 11,06%, dan perguruan tinggi hanya sebesar 2,12 %. Penduduk Desa Pasir Intan merupakan masyarakat pendatang (trans) yaitu dari Suku Jawa, Batak, Nias dan Minang.

Lembaga Kemasyarakatan yang ada adalah LKMD/LKMK, LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Posyandu, RT, RW, Kelompok Gotong Royong, BPD. Sarana umum yang ada di Desa Pasir Intan masih sangat minim dimana untuk pendidikan hanya terdapat 1 (satu) TK dan 1 (satu) SD. Fasilitas kesehatan tidak ada sedangkan tenaga kesehatan hanya terdapat 1 bidan desa. Sarana perekonomian hanya terdapat kios/warung sebanyak 37 unit. Tidak ada akses kendaraan umum dari ibukota Kabupaten ke Desa Pasir Intan.

Masyarakat Desa Pasir Intan merupakan masyarakat desa transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah dan mulai menempati desa sejak tahun 1981. Sebagai desa transmigrasi setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat lahan dengan luas yang sama yaitu 0,25 ha untuk rumah/pekarangan dan 2 ha untuk usaha pertanian/perkebunan. Perbedaan jumlah lahan yang dimiliki sekarang ini dikarenakan ada sebagian warga yang menjual lahannya kepada warga lain disebabkan kebutuhan atau ketidakmampuan menggarap lahan. Pada tahun-tahun pertama menempati desa, masyarakat masih mengandalkan pertanian sawah dan palawija sebagai mata pencaharian utama. Sejak tahun 1995 masyarakat mulai menanam sawit dan karet pada lahan usahanya.

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Desa Pasir Intan sebagian besar adalah petani yaitu petani sawit dan karet dan sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sebagai sumber penghasilan tambahan masyarakat juga memperoleh hasil dari beternak sapi dan kambing, serta dari budidaya ikan. Tanaman pangan sangat potensial untuk dikembangkan namun terdapat kendala yaitu musim yang tidak menentu, dan harga jual yang relatif rendah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik untuk menanam sawit dan karet dimana pasarnya sudah pasti dan harga lebih menjanjikan. Luas areal berdasarkan penggunaan lahan disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2. Penggunaan lahan dan luas arealnya di Desa Pasir Intan

Dari 1 (satu) ha lahan yang ditanami sawit masyarakat rata-rata memperoleh 2.500 – 3.000 kg setiap bulannya. Produksi rata-rata sawit adalah 800 Kg/Ha/2 minggu. Sedangkan dari 1 (satu) ha lahan yang ditanami karet masyarakat memperoleh 200 – 300 kg setiap bulannya. Produksi rata-rata karet adalah 70 Kg/Ha/minggu (umur tanaman 5 – 8 th). Luas kepemilikan lahan per KK adalah minimal 2 Ha, dengan pendapatan rata-rata berkisar dari Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- per bulan. Banyaknya penghasilan petani sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan kondisi cuaca terutama untuk karet karena ketika musim hujan petani tidak bisa menyadap dan mutu karet rendah.

Penjualan sawit dan karet dilakukan kepada agen (toke). Agen (toke) berkewajiban membayar retribusi kepada desa yang dihitung berdasarkan jumlah panen yang dibeli, sehingga masyarakat mendapatkan hasil jual panen bersih setelah dipotong biaya retribusi oleh agen. Biaya retribusi digunakan untuk perbaikan sarana prasarana jalan desa.

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2010 masih terdapat 103 KK yang tergolong masyarakat miskin di Desa Pasir Intan. Masyarakat miskin ini setiap bulannya mendapat subsidi beras sebanyak 15 Kg per bulan dari pemerintah.

Aktifitas perekonomian di Desa Pasir Intan yang dominan adalah penjualan sawit dan karet yang dilakukan melalui agen. Desa Pasir Intan tidak mempunyai pasar tradisional sendiri. Aktifitas jual beli barang harian/keperluan sehari-hari dilakukan di kios/warung atau pasar tradisional di desa-desa lain yang terletak 9 – 12 km dari Desa Pasir Intan.

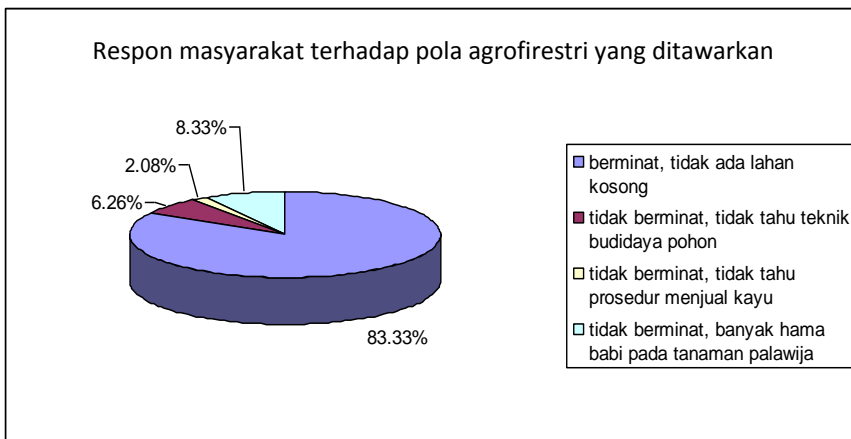
B. Pandangan Masyarakat terhadap Pola Agroforestri Tanaman Penghasil Pulp

Agroforestri sudah dikenal di Indonesia selama berabad-abad (Michon dan de Foresta, 1993). Demikian juga halnya dengan masyarakat Desa Pasir Intan. Pada umumnya masyarakat sudah mengenal pola agroforestri dengan istilah tanaman campuran atau tumpang sari. Praktek tumpang sari sudah dilakukan oleh masyarakat pada tahun pertama penanaman karet. Namun akhir-

akhir ini kegiatan ini jarang dilakukan karena masyarakat merasa dengan menanam karet saja sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, praktek tumpang sari dirasakan kurang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat karena hasilnya tidak maksimal disebabkan penanganan yang kurang intensif. Hal ini terjadi karena waktu mereka lebih banyak digunakan untuk menangani kebun karet dan sawit, sehingga tanaman semusim kurang terawat dan menimbulkan hama terutama babi.

Untuk tanaman penghasil pulp, jenis yang dikenal masyarakat pada umumnya hanya akasia. Jenis pohon komoditi kehutanan lain yang dikenal masyarakat adalah meranti, sengon, dan mahoni. Jenis jabon sudah pernah didengar oleh masyarakat namun dikenal tidak sebagai jenis alternatif penghasil pulp.

Masyarakat menyambut baik pola agroforestri tanaman penghasil pulp. Sebanyak 83,33% (40 orang) dari responden mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi pada penerapan pola ini adalah masyarakat tidak mempunyai lahan kosong untuk ditanami komoditi kehutanan dan tanaman selanya. Lahan yang ada umumnya sudah dimanfaatkan untuk tanaman sawit dan karet. Respon masyarakat terhadap pola agroforestri pada tanaman penghasil pulp dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Respon masyarakat terhadap pola agroforestri

Kendala lain yang menyebabkan masyarakat tidak memprioritaskan tanaman komoditi kehutanan di lahan mereka adalah tidak adanya pasar yang nantinya membeli kayu dan kurangnya tenaga pendamping/penyuluh lapangan yang dapat memberikan informasi teknik budidayanya. Sesuai informasi yang diperoleh dari masyarakat dan dinas terkait di Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak ada industri kayu sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat ketika menanam kayu tidak ada yang siap untuk membeli atau walaupun ada hanya untuk skala kecil dan harga sangat minim. Selain soal pasar, soal perizinan untuk menebang dan menjual kayu rakyat yang dianggap berbelit-belit juga masih menjadi kendala.

Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman (2006) berdasarkan hasil-hasil penelitian dari beberapa lokasi hutan rakyat, permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan hutan rakyat adalah hal-hal terkait dengan sub sistem produksi, pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan dan kebijakan serta peraturan perundangan. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan potensi dan peranan hutan rakyat menjadi tidak optimal.

Pada sub sistem produksi, produktivitas hutan rakyat sampai saat ini belum optimal karena keterbatasan masyarakat dalam pengetahuan teknik silvikultur seperti pemilihan jenis pohon, penggunaan bibit unggul, pengaturan jarak tanam dan pemeliharaan tanaman. Pada sub sistem pemasaran pengetahuan petani dalam memasarkan hasil kayunya masih sangat kurang, sehingga dirasakan rumit dan menurunkan minat untuk menanam komoditi kehutanan. Pada sub sistem kelembagaan, kebijakan dan peraturan perundangan, kebijakan pembangunan belum dirancang terpadu antara komoditi kehutanan dengan komoditi lain sehingga masyarakat lebih memilih komoditi yang secara tunggal sudah jelas-jelas dapat menghasilkan.

Permasalahan-pemmasalahan di atas terlihat pula pada respon masyarakat terhadap pola agroforestri pada tanaman penghasil pulp yang ditawarkan di Desa Pasir Intan. Sebanyak 83,3% responden berminat, akan tetapi tidak bisa melakukan dengan alasan tidak memiliki lahan. Menurut data monografi Desa Pasir Intan, sebanyak 652 ha lahan (57,61%) digunakan masyarakat sebagai kebun kelapa sawit, 230 ha (20,32%) untuk kebun karet, 6,7 ha (0,59%) untuk kebun kelapa, dan 243 ha (21,47%) untuk palawija dan sawah tadah hujan. Lahan yang diperuntukkan untuk palawija dan sawah tadah hujan ini kebanyakan tidak intensif digarap untuk palawija dan sawah tadah hujan, sehingga pada perkembangannya ada yang kemudian dijadikan kebun sawit dan karet.

Responden lain sebanyak 6,26% tidak berminat karena tidak tahu cara budidaya pohon. Thamrin, H. (2003) mengatakan bahwa suatu jenis akan diusahakan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik lahan jika memenuhi 4 faktor, yaitu jenis tanaman yang ditanam adalah jenis yang sudah dikenal masyarakat dan sudah diketahui teknologi penanamannya; terdapat kesesuaian lahan antara jenis tanaman dan lahan yang ditanami agar produktivitas maksimal; hasil produksi tanaman sudah memiliki pemasaran yang pasti; dan adanya aksesibilitas untuk sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran. Selanjutnya, Alviya *dkk.* (2007) mengatakan bahwa untuk mengatasi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan rakyat, jenis keterampilan yang dibutuhkan masyarakat antara lain teknik budidaya, pemanfaatan teknologi, pemanenan dan pasca panen. Namun Rochmayanto *dkk.* (2010) mengatakan bahwa rendahnya animo masyarakat Riau bukan disebabkan oleh penguasaan teknik budidaya hutan rakyat yang rendah, namun akibat lemahnya kapasitas manajerial wirausaha serta kurangnya penguasaan indikator investasi. Banyak aktivitas usaha baik di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dilakukan masyarakat dengan luas terbatas kemudian menemui kendala tidak dapat bertahan karena tidak seimbangnyanya pemasukan dan pengeluaran.

Kekhawatiran akan gagal merupakan salah satu respon yang diberikan masyarakat terhadap pola agroforestri pada tanaman penghasil pulp yang ditawarkan (8,33% responden tidak berminat karena khawatir akan gagal oleh

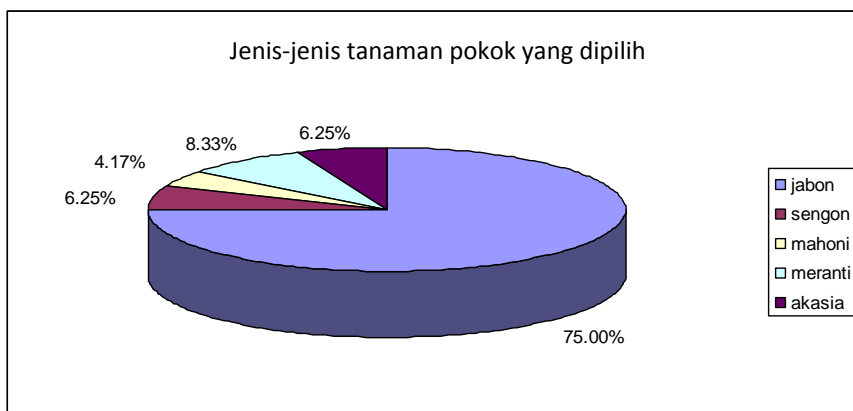
adanya hama). Pada saat ini sebagian besar lahan masyarakat ditanami dengan sawit atau karet. Adanya lahan dengan komoditi pertanian pada pola agroforestri menurut pandangan masyarakat akan mengundang datangnya hama terutama babi, sehingga perlu upaya lebih dalam pemeliharaan tanaman.

Pengetahuan petani dalam memasarkan komoditi kehutanan (kayu) juga mempengaruhi minat masyarakat Desa Pasir Intan terhadap pola agroforestri pada tanaman penghasil pulp yang ditawarkan. Sebanyak 2,08% responden tidak berminat karena tidak tahu prosedur penjualan kayu, dan yang masyarakat ketahui hanyalah kerumitan kalau berurusan dengan penjualan kayu. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, bahwa peraturan yang menyangkut izin tebang bagi petani hutan rakyat masih dirasakan cukup rumit dan belum ada kejelasan tentang pasar dan perlindungan harga kayu rakyat yang wajar (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, 2006).

C. Tanaman Pokok Jenis Penghasil Pulp dan Tanaman Sela yang Diinginkan

Tanaman pokok jenis penghasil pulp pilihan masyarakat yang akan diterapkan pada plot ujicoba adalah jabon. Dari lima jenis pohon untuk tanaman pokok yang ditawarkan, sebanyak 75% (36 orang) dari responden memilih jabon. Masyarakat memilih jabon karena pernah mendengar bahwa pada saat ini di beberapa tempat di Pulau Jawa penanaman jabon sedang diminati karena harganya yang cukup tinggi. Pemanfaatan jabon sebagai bahan baku pulp atau untuk kebutuhan lain bagi pembelinya kelak tidak menjadi pertimbangan masyarakat, yang penting adalah bibit dapat diperoleh, pemeliharaan tanamannya tidak sulit, kayunya dapat dijual dengan harga tinggi, pasar tersedia dan perizinan untuk menebang dan menjual tidak sulit.

Gambar berikut menunjukkan persentase jenis-jenis tanaman pokok yang dipilih masyarakat.



Gambar 4. Jenis-jenis tanaman pokok yang dipilih masyarakat

Hasil penelitian Supangat *dkk.* (2002) menunjukkan bahwa kecenderungan petani memilih atau menentukan suatu jenis tanaman yang ditanam di lahannya antara lain karena bibitnya tidak membeli (41%), pemasaran

bagus (38%), nilai jual tinggi (17%) dan tradisi yang telah berlangsung lama (4%). Sementara itu Tohadi (1998) dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman (2006) mengatakan bahwa pemanfaatan lahan secara agroforestri berdasarkan orientasi pasar dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu : subsisten (jenis tanaman yang ditanam untuk kebutuhan sendiri), subsisten dengan komersial (untuk kebutuhan sendiri dan sebagian dijual), komersial dengan subsisten (untuk dijual dan masih memanfaatkan untuk kebutuhan sendiri), dan komersial (tanaman yang ditanam untuk diperdagangkan). Berdasarkan orientasi pasar maka masyarakat Desa Pasir Intan cenderung kepada kategori komersial.

Tanaman sela komoditi pertanian yang diinginkan masyarakat adalah kacang-kacangan, timun dan cabe. Jenis-jenis ini dipilih karena merupakan jenis yang menurut pendapat masyarakat dapat bertahan karena tidak akan diganggu hama babi, disamping cara bercocok tanamnya sudah mereka pahami. Di samping tanaman sela komoditi pertanian, masyarakat juga menginginkan adanya tanaman sela komoditi perkebunan. Alasannya adalah bahwa setelah panen tanaman pokok pada umur 5 (lima) tahun masyarakat masih memiliki tanaman perkebunan yang berumur panjang pada lahan yang pernah mereka buka sehingga hasilnya masih dapat dinikmati hingga beberapa tahun. Jenis yang dipilih untuk komoditi perkebunan adalah kopi dan coklat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, mempunyai minat terhadap pola agroforestri pada tanaman penghasil pulp yang ditawarkan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pola agroforestri pada hutan rakyat penghasil pulp adalah : 1) terbatasnya lahan; 2) tidak mempunyai akses untuk mendapatkan bibit komoditi kehutanan dan teknik budidayanya; 3) tidak mengetahui prosedur penjualan komoditi kehutanan (kayu), peraturan penjualan dirasa rumit; 4) penanaman palawija pada pola agroforestri dipandang tidak dapat berjalan optimal karena banyak hama babi.
2. Tanaman pokok yang diinginkan masyarakat adalah jabon, dengan alasan masyarakat pernah mendapat informasi bahwa jabon dapat dipanen dalam waktu 5 tahun (tidak dikenal sebagai jenis alternatif pulp). Tanaman sela komoditi perkebunan yang diinginkan adalah kopi dan coklat. Tanaman sela komoditi pertanian yang diinginkan adalah cabe, kacang-kacangan dan timun.

B. Saran

1. Minat masyarakat untuk merealisasikan penanaman tanaman penghasil kayu pulp dengan pola agroforestri dapat dilakukan antara lain dengan cara : 1) menggunakan lahan yang diperuntukkan sebagai sawah tadah hujan, palawija, sawit dan karet yang kurang produktif untuk pola agroforestri; 2) memberikan informasi kepada masyarakat untuk dapat memperoleh bibit tanaman kehutanan dan teknik budidayanya; 3) memberikan informasi tata

- niaga kayu kepada masyarakat; 4) memilih jenis palawija yang tidak disukai babi (seperti timun, cabe, dan kacang panjang) dan membuat pagar pembatas pada areal tanaman palawija.
2. Peran Dinas Kehutanan setempat sangat diperlukan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai komoditi-komoditi kehutanan yang berprospek baik kepada masyarakat beserta peraturan-peraturan yang terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan dan membentuk kelompok tani kehutanan. Informasi yang diterima masyarakat akan menentukan animo masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan lahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, Iis dan E.Y. Suryandari. 2006. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Sistem Agroforestri di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 3 No. 1, Maret 2006. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Alviya, Iis, N. Sakuntaladewi dan I. Hakim. 2007. Pengembangan Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Pandeglang. *Info Sosial Ekonomi Volume 7 No. 1*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor
- Departemen Kehutanan. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025. Departemen Kehutanan. Jakarta
- Hendromono, Y. Heryati dan N. Mindawati. 2006. Teknik Silvikultur Hutan Tanaman Industri. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor
- Kartasubrata, J. 2003. *Social Forestry dan Agroforestry di Asia (Buku I)*. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Michon, G dan H. de Foresta. 1993. Peranan Sistem Agroforest Bagi Dunia Kehutanan dan Pertanian. ICRAF and BIOTROP. Bogor
- Mindawati, Nina. 2009. Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010-2014 Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu Pulp. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Bogor
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. 2006. Review Hasil Penelitian Hutan Rakyat, Desember 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor
- Prahasto, H. 2002. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Secara Adat : Kasus Repong Damar dan Tembawang. *Buletin Badan Litbang Kehutanan 3 (1)*. Jakarta
- Rochmayanto, Y., R. Supriyadi, D. Frianto, dan Irwan. 2010. Kajian Penetapan Luas Optimum Pembangunan Hutan Rakyat Kayu Pulp. 2010. Laporan

- Hasil Penelitian Tahun 2010. Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat. Tidak dipublikasikan.
- Supangat, A.B. Basuki, T.M. dan Sukresno. 2002. Efek Faktor Pengelolaan Tanaman terhadap Erosi dan Limpasan pada Hutan Rakyat Kopi dan Sengon di Wonosobo. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian BP2TPDAS-IBB Surakarta.
- Thamrin H. 2003. Pola-Pola Agroforestry yang Dikembangkan Masyarakat Desa Bukit Biru, Tenggara. Buletin Poltanesa. Vol 3 Tahun 2. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
- Tohadi. 1998. Review Hasil Penelitian Hutan Rakyat, Desember 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Terhadap Responden Pada Survei Untuk Mengetahui Minat Masyarakat Terhadap Pola Agroforestri Hutan Rakyat Penghasil Kayu Pulp

- A. Identitas responden
1. Nama :
 2. Umur :
 3. Tempat tinggal : Dusun/RT/RW
 4. Penduduk : Asli/pendatang dari dan tahun datang
 5. Pendidikan formal terakhir :
 6. Pekerjaan utama :
 7. Pekerjaan sampingan :
 8. Anggota keluarga : jumlah anak dan jumlah tanggungan
- B. Penggunaan lahan
1. Rumah : luas (ha) dan status (milik sendiri/pihaklain)
 2. Pekarangan : luas (ha) dan status (milik sendiri/pihaklain)
 3. Kebun : luas (ha) dan status (milik sendiri/pihaklain)
 4. Ladang : luas (ha) dan status (milik sendiri/pihaklain)
 5. Sawah : luas (ha) dan status (milik sendiri/pihaklain)
 6. Lain-lain
- C. Usaha kebun utama
1. Berapa lama anda mengelola kebun ? (sejak tahun)
 2. Jenis tanaman pada kebun (sebutkan jenis dan luas masing-masing)
 3. Hasil dari kebun (jelaskan musim panen masing-masing jenis, hasil dan harga komoditinya)
 4. Apakah ada usaha tani/kebun lain ? (sebutkan luas, jenis dan hasilnya)
- D. Tentang agroforestri
Tuliskan apa yang diketahui responden tentang agroforestri
- E. Tentang tanaman penghasil pulp
Tuliskan apa yang diketahui responden tentang tanaman penghasil pulp
- F. Jika ada pola agroforestri hutan rakyat penghasil pulp, jenis tanaman apa yang diinginkan untuk :
1. Tanaman pokok : jenis dan alasan memilih jenis tsb
 2. Tanaman sela : jenis dan alasan memilih jenis tsb
- G. Jika pola agroforestri hutan rakyat penghasil pulp dilakukan apakah yang menjadi :
1. harapan (uraikan)
 2. hambatan (uraikan, jika ada)
 3. masalah (uraikan, jika ada)
 4. kebutuhan (uraikan, jika ada)